



**PENERAPAN HAK KEKEBALAN PRIBADI DIPLOMATIK TERHADAP
KEPENTINGAN PELAYANAN DOMESTIK DITINJAU DARI KONVENSI
WINA 1961 (STUDI KASUS THE UK SUPREME COURT JUDGMENT OF
BASFAR V. WONG)**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

PATRICIA CAROLINE GINTING

NIM 11000120140639

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN HAK KEKEBALAN PRIBADI DIPLOMATIK TERHADAP
KEPENTINGAN PELAYANAN DOMESTIK DITINJAU DARI KONVENSI
WINA 1961 (STUDI KASUS THE UK SUPREME COURT JUDGMENT OF
BASFAR V. WONG)

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

PATRICIA CAROLINE GINTING

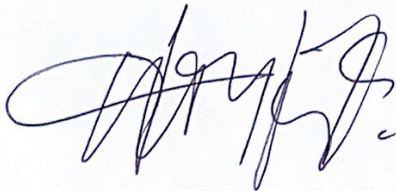
NIM 11000120140639

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum
NIP 196012301986032004



Peni Susetyorini, S.H., M.Hum
NIP 196809121994032001

HALAMAN PENGUJIAN

PENERAPAN HAK KEKEBALAN PRIBADI DIPLOMATIK TERHADAP
KEPENTINGAN PELAYANAN DOMESTIK DITINJAU DARI KONVENSI
WINA 1961 (STUDI KASUS THE UK SUPREME COURT JUDGMENT OF
BASFAR V. WONG)

PENULISAN HUKUM

Dipersiapkan dan disusun

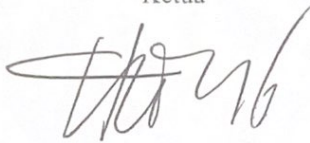
Oleh:

PATRICIA CAROLINE GINTING

NIM 11000120140639

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Mei 2024

Dewan Penguji
Ketua



Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.
NIP. 196012301986032004

Anggota Penguji I



Peni Susetyorini, S.H., M.H.
NIP. 196809121994032001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro



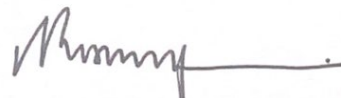
Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II



Dr. Elfia Farida, S.H., M.Hum.
NIP. 197010291995122001

Mengetahui:
Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesajanaan di suatu Program Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 1 April 2024



Patricia Caroline Ginting
NIM 11000120140639

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jesus I need you, Every moment I need you”

“Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.

(1 Korintus 15:58)

Penulisan Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk:

Kedua orang tua penulis

Sahabat dan rekan seperjuangan

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia serta berkat – Nya yang tidak berkesudahan kepada saya. Dengan penuh rasa syukur dan bangga saya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan lancar dan tepat waktu dengan judul “Penerapan Hak Kekebalan Pribadi Diplomatik Terhadap Kepentingan Pelayanan Domestik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus The Uk Supreme Court Judgment Of Basfar V. Wong). Skripsi ini merupakan penulisan serta penelitian Penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjadi syarat kelulusan dengan dibantu oleh dosen pembimbing.

Dengan segenap hati, saya ingin mengucapkan syukur saya kepada berbagai pihak yang membantu Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya selaku Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang turut membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini,

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

4. Ibu Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., M.L.I., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk membantu Penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini;
6. Ibu Peni Susetyorini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan waktu dan membantu Penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu Penulis selama masa studi;
8. Papa, Mama, dan Adik Penulis yang selalu memberikan semangat dan doa selama Penulis menjalankan masa studi dan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan lancar dan tepat waktu;
9. Sarah, Viki dan Endi selaku sahabat Penulis yang selalu ada saat masa susah dan senang;
10. Sahabat-sahabat SMA Penulis yang sama-sama masih berjuang dengan tugas akhir (Angie, Eria, Ines, Jovanka, Pinky, Vereen, Janice, dan Marcia);
11. Sahabat seperjuangan Penulis semasa kuliah (Anat, Anya, Luthfi, Yere, Dimas, Sena, Caca, Donna, Tia, Kenkyo, Rey, Ocik, Vincent, Grandson, dan Mahram);

12. Teman-teman KKN (Kikay, Ica, dan Zhalma) yang selalu menemani Penulis saat awal KKN hingga sekarang saat masa penulisan tugas akhir;
13. Seluruh teman-teman Staff Muda Halmas BEM FH Undip 2021 (Afra, Fati, Kevin, Nisa, Rahesa, Richardo, Salsa, Sulthan, dan Yuti) yang selalu sama-sama kebersamai Halmas BEM FH Undip 2021 pada saat itu;
14. Teman-teman English Development Division ALSA LC Undip 2022 dan teman-teman ALSA LC Undip 2022;
15. Seluruh pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan secara satu per satu yang pernah menjadi bagian dalam cerita hidup Penulis saat semasa Penulis menjalankan studi di Universitas Diponegoro. Terima kasih karena sudah menjadi teman baik Penulis dalam kehidupan perantauan, semoga kita dipertemukan kembali di masa yang akan datang dan kembali menjadi teman baik;

Semarang, 1 April 2024

Patricia Caroline Ginting

ABSTRAK

Hubungan diplomatik dibangun atas dasar kesepakatan bersama dari kedua negara dan memerlukan pertimbangan prinsip hukum timbal balik bagi kedua negara. Setiap perwakilan diplomatik akan mendapatkan hak khusus serta hak istimewa agar dapat mempermudah tugas misinya sebagai perwakilan negara dan dalam praktiknya tidak jarang ditemukan tindak pelanggaran terhadap hak kekebalan dan hak keistimewaan tersebut. Penelitian dan penulisan hukum dibuat dengan tujuan untuk dapat menganalisis dan mengetahui prinsip kekebalan terhadap perlindungan bagi Agen Diplomatik dan Pekerja Rumah Tangga. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konvensi, dan pendekatan kasus. Agen Diplomatik Arab Saudi telah melanggar hukum yang berlaku di Inggris sebagai Negara Penerima seperti peraturan pembayaran upah minimum dan peraturan penerapan jam kerja. Hal tersebut jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya untuk menghormati hukum nasional dari negara setempat. Inggris sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh memiliki kapasitas dalam menindak pelanggaran hukum yang merugikan negaranya, sehingga dapat menggunakan prinsip *jure imperii* terhadap Agen Diplomatik tersebut dengan mengenakan sanksi *persona non grata*.

Kata Kunci: Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik, Pejabat Diplomatik

ABSTRACT

Considering the principle of reciprocity for both countries. Every diplomatic representative will receive special rights and privileges to facilitate their mission as representatives of their country. In practice, violations of these immunity and privilege rights are not uncommon. Legal research and writing are aimed at analyzing and understanding the principle of immunity for the protection of Diplomatic Officials and Domestic Workers. This legal writing employs a normative juridical research method with a legislative approach, a convention approach, and a case approach. A Saudi Arabian Diplomatic Official has violated the applicable laws in the United Kingdom as the Receiving State, such as the minimum wage regulations and working hour regulations. This is clearly an action that contradicts their obligation to respect the national laws of the host country. The United Kingdom, as a fully sovereign country, has the capacity to take action against lawbreakers that harm the country, thus it can apply the principle of jure imperi against the Diplomatic Official by imposing the sanction of persona non grata.

Keywords: Diplomatic Immunity and Privileges, Diplomatic Officials

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Jenis Data	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Metode Analisis Data	15
F. Sistematika Penulisan.....	16
G. Orisinalitas Penelitian	18
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	21

A. Tinjauan Umum Hukum Diplomatik dan Hubungan Diplomatik..	21
1. Pengertian Hukum Diplomatik dan Hubungan Diplomatik.....	21
2. Sumber Hukum Diplomatik.....	23
3. Pejabat Diplomatik.....	24
B. Kekebalan Diplomatik dalam Konvensi Wina 1961	27
1. Pembukaan dan Perwakilan Diplomatik	27
2. Hak Kekebalan dan Hak Istimewa Diplomatik.....	30
C. Perlindungan Pekerja Migran sesuai dengan Aturan Internasional Labor Organization (ILO)	33
D. Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara	36
1. Pengertian Kedaulatan Negara.....	36
2. Pengertian Yurisdiksi Negara.....	39
3. Prinsip Yurisdiksi Negara.....	40
E. Penyelesaian Sengketa Melalui <i>The UK Supreme Court</i>/ Mahkamah Agung Inggris	43
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Kronologi Kasus.....	46
B. Analisis Prinsip Kekebalan dan Keistimewaan Agen Diplomatik Arab Saudi Terhadap Tenaga Kerja Filipina Ditinjau dari Konvensi Wina 1961	53
1. Kekebalan Agen Diplomatik Arab Saudi di Inggris.....	53
2. Hak Hukum Asisten Rumah Tangga Migran Filipina di Rumah Tangga Agen Diplomatik	56
3. Pelanggaran yang Dilakukan oleh Mr. Khalid Basfar.....	64
C. Penyelesaian Kasus Melalui Putusan <i>The UK Supreme Court</i>.....	75
1. Yurisdiksi Pengadilan Inggris terhadap Agen Diplomatik.....	75
2. Hasil Putusan The UK Supreme Court	79
BAB IV: PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	lxxxvi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian.....	18
Tabel 3.1 The UK National Minimum Wage and National Living Wage Rates.....	49